



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN SINGKAT**

**KOMISI VIII DPR RI (BIDANG AGAMA, SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEBENCANAAN)**

Tahun Sidang	: 2022-2023
Masa Persidangan	: II
Rapat Ke	: 10
Jenis Rapat	: Audiensi
Dengan	: Kelompok Kerja Madrasah Aliyah Provinsi Jawa Barat
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, Tanggal	: Rabu, 23 November 2022.
Waktu	: Pukul 11.30 WIB.
Tempat	: Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI Gedung Nusantara II lantai 1 Jl. Jenderal Gatot Subroto – Jakarta 10270.
Acara	: Menerima Masukan tentang Program Bantuan Pendidikan Menengah Universal
Ketua Rapat	: DR. H. TB. Ace Hasan Syadzily, M.Si
Sekretaris Rapat	: Sigit Bawono Prasetyo, S.Sos., M.Si.
Hadir	: 1. 43 dari 52 Anggota Komisi VIII DPR RI. 2. 9 Anggota Komisi VIII DPR RI Izin. 3. Kelompok Kerja Madrasah Aliyah Provinsi Jawa Barat

I. PENDAHULUAN:

1. Ketua Rapat membuka Rapat Komisi VIII DPR RI pada pukul 11.30 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, DR. H. TB. Ace Hasan Syadzily, M.Si dengan didampingi Wakil Ketua Laksdya TNI (PURN) Moekhlas Sidik, MPA. dan Wakil Ketua H. Marwan Dasopang, M.Si, sesuai waktu dan tempat acara tersebut di atas.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Dalam audiensi antara Komisi VIII DPR RI dengan Kelompok Kerja Madrasah Aliyah (KKMA) Provinsi Jawa Barat dapat dicatat antara lain:

1. Kelompok Kerja Madrasah Aliyah (KKMA) Provinsi Jawa Barat menyampaikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Bantuan hibah Bantuan Pendidikan Mengengah Universal (BPMU) dari Pemerintah Provinsi Jabar untuk Madrasah Aliyah Negeri (MAN) dan Madrasah Aliyah Swasta (MAS) se-Jabar tahun 2022 ini belum bisa dicairkan karena menunggu proses hibah dari Biro Kesra Pemprov Jabar kepada Kanwil Kemenag Jabar.
 - b. Biro Kesra Pemerintah Provinsi Jabar beralasan bahwa penundaan hibah bantuan untuk siswa/i MAN dan MAS itu menunggu surat rekomendasi pencairan dari Kementerian Dalam Negeri RI.
 - c. Bantuan hibah BPMU sudah disalurkan kepada siswa SMA, SMK dan SLB swasta tetapi belum didistribusikan kepada sekitar 394.000 siswa/i MAN dan MAS dan nilai bantuan itu sebesar Rp700ribu per siswa/i.
 - d. Sejumlah MAS yang belum menerima bantuan hibah BPMU kini resah karena banyak guru honorer yang belum mendapat honor dan bahkan mengajukan pinjaman ke bank.
2. Komisi VIII DPR RI menyampaikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Komisi VIII DPR RI telah membentuk Panitia Kerja tentang Pengawasan Pendidikan Keagamaan untuk memastikan tidak ada diskriminasi antara pendidikan umum dan pendidikan keagamaan.

- b. Komisi VIII DPR RI akan mendorong Kementerian Dalam Negeri RI untuk memberi rekomendasi bagi pencairan hibah BPMU untuk MAN dan MAS se-Jabar.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 12.30 WIB.

**PIMPINAN KOMISI VIII DPR RI
WAKIL KETUA,**


DR. H. TB. ACE HASAN SYADZILY, M.Si